# RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

## DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-2 (satu) Renstra DPKPP Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2022, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja Perubahan DPKPP Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2022.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2022 DPKPP Kabupaten Luwu Timur ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur DPKPP, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Malili, Agustus 2022

**Plt. KEPALA DPKPP**

**ANDI WIJA HASAN, ST**
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19740323200312100 4



Scanned with CamScanner

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| **KATA PENGANTAR** | | i |
| **DAFTAR ISI** | | ii |
| ***BAB I*** | ***PENDAHULUAN*** | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 9 |
| ***BAB II*** | ***HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*** | 11 |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 11 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 19 |
| ***BAB III*** | ***RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH*** | 28 |
| ***BAB IV*** | ***PENUTUP*** | ***45*** |




Scanned with CamScanner

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

### 1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2021.

### 1.1.2 Proses Penyusunan Renja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal : Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan : penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/Lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas : Perangkat Daerah forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka

penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir : Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur menyampaiakn seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanhan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabuapten Luwu Timur.

### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

   Rancangan Awal Renja kemudin disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaiak kepada Bapelitbangda Kab. Luwu Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
   Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
   Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
    Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2021.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu timur janka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2022 ;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan daerah;

3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Renja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan

dan sistematika penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah triwulan II (tahun n ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun- tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan

realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja perubahan dan pendanaan perangkat daerah pada tahun berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB. II**

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2020**

**2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengindentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Renja perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Dalam mengevaluasi capaian dan analisis kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada :

**2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta indicator dan target IKU tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/SK/DPKPP, Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun IKU DPKPP Kabupaten Luwu Timur diuraikan pada table 2.2 di bawah ini

| TUJUAN & SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | TARGET 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 (TW 2) | |
| SASARAN 1:<br>Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak | *Persentase capaian SPM Perumahan ('%)* | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah ('%)* | 1,98 | 12,25 | 0 | 0,36 |
| | *Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)* | 0 | 0,07 | 0 | 90 |
| SASARAN 2<br>Tersedianya tanah untuk kepentingan umum | *Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan (%)* | 0 | 95 | 21,35 | 95 |
| SASARAN 3:<br>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | *Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (%)* | 90.01 | 84,87 | 19,71 | 92.01 |

Tabel 2.2

Capaian Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur sampai dengan

Triwulan II Tahun 2022

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** | % | 100,00 | 0,95 | 69,91 | DPKPP |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu** | **dokumen** | **16** | **16** | **5** | DPKPP |
| Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | dokumen | 2 | 2 | 2 | DPKPP |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | dokumen | 2 | 2 | 1 | DPKPP |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | dokumen | 2 | 2 | - | DPKPP |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen) | dokumen | 10 | 10 | 2 | DPKPP |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah** | **%** | **100,00** | **100,00** | **93,18** | DPKPP |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 19 | 20 | 19 | DPKPP |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | laporan | 18 | 18 | 3 | DPKPP |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi barang milik perangkat daerah** | **%** | **100,00** | **95%** | **25%** | DPKPP |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah skpd yang disusun tepat waktu | laporan | 4 | 4 | 1 | DPKPP |
| **Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah** | **Jumlah realisasi PAD perangkat daerah** | **Rp.** | **-** | **-** | **-** | DPKPP |
| Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | laporan | 1 | - | - | DPKPP |

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2022

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **%** | **100,00** | **95,00** | **83,33** | DPKPP |
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | | | | 55 pasang | - | |
| Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | dokumen | 12 | 12 | 3 | DPKPP |
| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | orang | 22 | 20 | 4 | DPKPP |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah** | **%** | **100,00** | **95%** | **23,75** | DPKPP |
| Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | Jumlahpaket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | unit | 3 | 3 | 3 | DPKPP |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | unit | 4 | 11 | 4 | DPKPP |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 11 | 19 | 11 | DPKPP |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | paket | 3 | 3 | 3 | DPKPP |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan | eksemplar | 72 | 72 | 18 | DPKPP |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | laporan | 12 | 100 | 25 | DPKPP |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali) | laporan | 500 | 320 | 170 | DPKPP |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket) | unit | 2 | - | - | DPKPP |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan** | **unit** | **5** | **95%** | **0** | DPKPP |
| Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mebel yang diadakan (Unit) | unit | 4 | 2 | - | DPKPP |
| Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | unit | 1 | 1 | - | DPKPP |

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan** | **unit** | **5** | **95%** | **47,50** | DPKPP |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan (Unit) | unit | 4 | 17 | 4 | DPKPP |
| Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | unit | 1 | 8 | - | DPKPP |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **%** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | DPKPP |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar diadministrasikan (surat) | surat | 500 | 440 | 225 | DPKPP |
| Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening) | rekening | 2 | 3 | 2 | DPKPP |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan | orang | 9 | 9 | 9 | DPKPP |
| **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah** | **Jumlah barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah yang dipelihara** | **unit** | **70** | **95%** | **4** | DPKPP |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | unit | 13 | 11 | 1 | DPKPP |
| Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 57 | 47 | 3 | DPKPP |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 1 | 2 | - | DPKPP |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang | % | 100,00 | 80,00 | - | DPKPP |
| | Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni | % | 100,00 | - | - | DPKPP |

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota** | Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kotayang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan | **dokumen** | **2** | **-** | **-** | DPKPP |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten (laporan) | laporan | 1 | - | - | DPKPP |
| Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan | laporan | 1 | - | - | DPKPP |
| **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Persentase rumah korbanbencana atau relokasi program Kabupaten/Koa yang direhabilitasi dan dibangun | **%** | **-** | **80%** | **-** | DPKPP |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | **-** | **-** | **-** | DPKPP |
| Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | | | **-** | **-** | **-** | DPKPP |
| Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | **-** | **-** | **-** | DPKPP |
| **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola** | **%** | **100,00** | **80%** | **-** | DPKPP |
| Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (Lokasi) | lokasi | 7 | 3 | - | DPKPP |
| **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **Jumlahrekomendasiperizinanperumahanyangditerbitkan(rekomendasi)** | **rekomendasi** | **1** | **80%** | **-** | DPKPP |

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan yang responsif gender | rekomendasi | 1 | 55% | - | DPKPP |
| **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Rasio rumah layak huni | | **18,04** | **80%** | **-** | DPKPP |
| | Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah10 ha yang ditangani | **%** | **24,94** | **2,71** | **-** | DPKPP |
| **Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman** | Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi | dokumen | 1 | 90% | - | DPKPP |
| Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang disusun | dokumen | 1 | 1 Aplikasi; 1 RP3KP | - | DPKPP |
| Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh | Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi | kegiatan | 2 | - | - | DPKPP |
| **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawa 10 (Sepuluh) Ha** | **Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau** | % | 60,62 | 80% | - | DPKPP |
| | **Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh** | Ha | 21,20 | 2,57 | - | DPKPP |
| Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten | kawasan | 3 | - | - | DPKPP |
| Perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | unit | 623 | 160 | - | DPKPP |
| Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten | kawasan | 11 | - | - | DPKPP |

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **PEOGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU** | | **21,05** | **85%** | **-** | DPKPP |
| Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU | lingkungan | 1 | 1 | - | DPKPP |
| Penyediaan prasaran, Sarana, ddan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU | lingkungan | 1 | 1 | - | DPKPP |
| **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase penyelesaian kasus tanah negara** | **%** | **100,00** | **70,00** | **25%** | DPKPP |
| Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus yang terdaftar | kasus | 4 | 5 | 1 | DPKPP |
| Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus yang ditangani | kasus | 4 | 5 | 1 | DPKPP |
| **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERURIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUAN** | **Persentase luas lahan yang dibebaskan** | **%** | **100,00** | **-** | **100,00** | DPKPP |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n | m2 | 21.093 | - | 16.500 | DPKPP |
| Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2) | m2 | 21.093 | - | 16.500 | DPKPP |
| **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Persentasepengamanantanah Kosongaset Pemda** | **%** | **100,00** | **-** | **-** | DPKPP |
| Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi | bidang | 15 | - | - | DPKPP |
| Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana | bidang | 15 | - | - | DPKPP |

| Program/Kegiatan/Subkegiatan | Uraian Kinerja | | | Realisasi | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | Target | 2021 | 2022 TW 2 | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **Persentase izin lokasi** | **%** | **100,00** | **80%** | **25,00** | DPKPP |
| Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar | izin | 2 | 2 | 1 | DPKPP |
| Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah izin lokasi yang ditangani | izin | 2 | 2 | 1 | DPKPP |
| **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase luas lahan bersertifikat** | **%** | **39,85** | **-** | **-** | DPKPP |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota | Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi | % | 100,00 | - | - | DPKPP |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Luas Lahan bersertifikat yang difasilitasi | m2 | 4.100.596 | - | - | DPKPP |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab. Luwu Timur (DPKPP) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang Infrastruktur Perumahan, Sarana Prasarana Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Sarana Prasarana Kawasan Permukiman dan Pertanahan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SPM

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam IKK

maupun SPM. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
3. Bantuan untuk rumah korban bencana yang belum terlayani.

Capaian SPM pada tahun 2022 untuk kabupaten Luwu Timur sampai pada triwulan II belum ada. Karena sampai triwulan II Pada tahun 2022, tidak ada status bencana dan tidak ada relokasi program Pemerintah.

2. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indicator kinerja sasaran srtaegis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut ini adalah gambaran kinerja pelayanan melalui pencapaian IKU :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) DPKPP Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan Nasional. Adapaun indicator tersebut :

- Persentase capaian SPM perumahan;
- Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah;
- Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani;

- Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan;
- Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

  Dari 5 indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan sampai di tahun 2022 triwulan II belum ada yang mencapai target karena perhitungannya dilakukan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

3. Capaian Indikator Renstra

Dari 9 program baru 4 program yang telah terealisasi dari target triwulan yang ditargetkan :

**I. Program Pengembangan Perumahan** didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 7 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan pada triwulan II ditargetkan 1 laporan tetapi karena subkegiatan yang mendukung kegiatan ini belum ada yang terealisasi sehingga capaian masih 0%. Subkegiatan tersebut antara lain :
   a. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena Relokasi program Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten, pada triwulan II ditargetkan 1 dokumen, telah tercapai 100%.
   b. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan indicator Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan target pada triwulan II 1 dokumen dan telah terealisasi 100%.

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun, target pada triwulan II 25%. Pada kegiatan ini merupakan pemenuhan untuk Target pada SPM urusan Perumahan Rakyat, terkait dengan Rehab, pembangunan rumah bagi korban bencana dan pemenuhan PSU terkait bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan :

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan indikator Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi tidak ada target pada triwulan II. Hanya berkoordinasi dengan BPBD terkait kebencanaan. Karena anggaran pada subkegiatan ini sifatnya disediakan
b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, dengan indicator Jumlah rumah korban bencana yang dibangun tidak ada target pada triwulan II. Hanya berkoordinasi dengan BPBD terkait kebencanaan. Karena anggaran pada subkegiatan ini sifatnya disediakan
c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan indicator Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun, tidak ada target pada triwulan II. Hanya berkoordinasi dengan BPBD terkait kebencanaan. Karena anggaran pada subkegiatan ini sifatnya disediakan

3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan indikator Persentase rumah susun/rumah khusus yang dikelola, target pada triwulan I 25%, yang terdiri dari Subkegiatan :

a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan indikator Jumlah rumah susun umum

dan/atau rumah khusus yang dikelola, triwulan II ditargetkan 3 lokasi telah terealisasi sebanyak 3 lokasi. diperuntukkan biaya operasional dan gaji pengelolaa rumah susun PNS yang berada pada Desa Puncak Indah Kec. Malili dan rumah susun Sumasang yang berada di Desa Soroako Kec. Nuha, selain itu juga untuk pengelolaan Rumah Deret Nelayan.

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,dengan indikator, Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan, pada triwulan II, target 1 rekomendasi, pada kegiatan ini terdiri dari subkegiatan :
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan indikator Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan yang responsif gender, pada triwulan II ditargetkan 1 permohonan, tidak ada realisasi. Untuk subkegiatan ini diperuntukan untuk investigasi lapangan jika ada pengajuan untuk penerbitan IMB/PBG dan koordinasi pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

**II. Program Kawasan Permukiman** didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman,dengan indikator Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi target pada triwulan II, adalah 1 dokumen. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan :

a. Subkegiatan Penyusunan dan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan indikator yaitu. Pada triwulan II tidak ada target karena masih proses penyusunan dokumen. Subkegiatan ini diperuntukkan untuk jasa konsultasi penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

b. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, dengan indikator Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, pada triwulan II ditargetkan 1 kegiatan dan tercapai 100%, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh .

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, terdiri dari 2 indikator yaitu cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan luas penangan infrstruktur kawasan kumuh, kedua indikator pada triwulan II tidak ada target. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan :

a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh, dengan indicator Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten tidak ada target pada triwulan II. subkegiatan diperuntukkan untuk jasa konsultasi penyusunan master plan DED Kawasan kumuh, masih dalam proses penyusunan dokumen.

b. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan indikator Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki, tidak ada target pada triwulan II. Subkegiatan ini diperuntukkan sebagai pendampingan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan berdasarkan surat dari penyediaan perumahan, karena belum ada proses verifikasi Penerima Bantuan(PB) dilapangan sehingga belum terealisasi, tetapi tetap dilakukan koordinasi dengan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan Prov. Sulsel.

c. Subkegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, dengan indikator Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh

kewenangan Kabupaten, tidak ada target pada triwulan II. Sampai selesai triwulan II, proses DED telah selesai.

III. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan indikator Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU, pada triwulan I tidak ada target, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu :

a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian dengan indikator Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU, tidak ada target pada triwulan II, subkegiatan ini diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum perumahan nelayan.

Adapun program untuk memenuhi tercapainya sasaran 2 meliputi :

**I. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**, dengan indikator Persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan target 25%, yang terdiri kegiatan :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai indikator Jumlah kasus terdaftar, 1 target laporan kasus pada triwulan II. Subkegiatan pada kegiatan ini adalah :

a. Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah kasus yang ditangani, pada triwulan II ditargetkan sebanyak 1 kasus, pada triwulan II tidak ada laporan, terkait kasus tanah sehingga capaian 0%. Anggaran pada subkegiatan ini bersifat disediakan.

**II. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

a. subkegiatan Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan

Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada triwulan II tidak ada target, karena sediannya target kinerja pada triwulan I, tetapi karena keterlambatan dalam penyelesaian dokumen pendukung pengadaan tanah lokasi Islamic Centre dan melengkapi dokumen yang disarankan hasil ekspose di Kejari Malili. Selain untuk pengadaan tanah lokasi IC juga direncanakan untuk pengadaan tanah jalan PPI, sehingga terealisasi pada triwulan II, target kinerja pada triwulan I seluas 16.500m2, hanya dapat terealisasi pada triwulan II seluas 14.052m2. Karena untuk pengadaan tanah PPI setelah dilakukan konsultasi dengan BPKP disarankan pembayaran setelah perubahan dan setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sehingga untuk pelaksanaan pada belanja modal tersebut belum dapat terealisasi.

**III.** Program Pengelolaan Tanah Kosong, dengan indicator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda, target 25% pada triwulan I. Terdiri dari kegiatan :

1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, dengan indikator Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi tidak ada target pada triwulan II. Masih pada tahap inventarisasi bidang tanah yang akan diberi pengaman baik berupa patok maupun papan pengumuman.

**IV Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**, bertujuan untuk melakukan penertiban administrasi, legalitas dan pemberian identitas pada tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penerbitan izin Membuka Tanah yang terdiri dari 1 subkegiatan yaitu :

1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, subkegiatan ini, merupakan fasilitasi penetapan izin lokasi terkait tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Pada triwulan II ditargetkan 1 izin lokasi terealisasi 1 yaitu Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Sport Centre Kabupaten Luwu Timur. Sehingga capaian 100%

**V. Program Penatagunaan Tanah**, dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota. Pengamanan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemda atas suatu bidang tanah. Kegiatan ini pelaksanaannya dilaksanakan dengan pengumpulan data alas hak tanah Pemda dan surat keterangan tanah dari Pemerintah Desa setempat. Selain itu untuk memfasilitasi persertifikatan tanah milik warga dan rumah ibadah, Sehingga pada triwulan II tidak ada realisasi kinerja.

Indikator cakupan layanan pertanahan yang ditargetkan pada triwulan II tahun 2022 belum ada capaian yang dapat dihitung, karena data yang diperlukan belum lengkap.

# BAB III

## RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Program kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan diserta prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana yang lain yang sah.

Oleh karena itu, rencana kerja perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan setelah perubahan untuk tahun 2022. Matriks rumusan rencana kerja Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang sudah berjalan di Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang sudah berjalan di DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dari 9 program yang dilaksanakan dengan 21 kegiatan dan 44 sub kegiatan di rencana kerja pokok, pada rencana kerja perubahan tidak penambahan kegiatan dan sub kegiatan, adapun yang mengalami perubahan hanya pada perubahan target dengan menyesuaikan hasil evaluasi kinerja.

Adapun program kegiatan dan subkegiatan yang mengalami target dan anggran dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)** | **100** | **100** | **100** | **7.918.718.205,00** | **3.572.989.143** | **5.748.490.943** |
| **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)** | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)** | **100** | **100** | **100** | **40.000.000,00** | **72.424.350** | **40.000.000** |
| 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 3 | 2 | 3 | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | 10.000.000,00 | 3.864.350 | 10.000.000 |
| 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | 10.000.000,00 | 3.825.000 | 10.000.000 |
| 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 10 | 10 | 10 | 10.000.000,00 | 54.735.000 | 10.000.000 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)** | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)** | **100** | **-** | **-** | **2.775.264.693,00** | **2.622.316.662** | **2.775.264.693** |
| 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | 22 | 22 | 22 | 2.725.344.693,00 | 2.587.919.922 | 2.725.344.693 |
| 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulan/triwulan/seme steran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Jumlah dokumen laporan keuangan bulan/triwulan/sem esteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 18 | 18 | 18 | 49.920.000,00 | 34.396.740 | 49.920.000 |
| **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)** | **Persentase BMD yang Diadministrasika n sesuai standar (%)** | **100** | **-** | **-** | **13.624.020,00** | **19.400.000** | **13.624.020** |
| 2,03 | 06 | Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 13.624.020,00 | 19.400.000 | 13.624.020 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (%)** | **Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (%)** | **100** | **-** | **-** | **1.125.424,00** | **7.799.780** | **1.000.000** |
| 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 1.000.000,00 | 7.799.780 | 1.000.000 |
| **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)** | **Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)** | **100** | **-** | **-** | **108.646.072,00** | **135.260.723** | **108.646.072** |
| 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atributkelengkapannya yang diadakan (stel) | Jumlah pakaian dinas beserta atributkelengkapannya yang diadakan (stel) | 55 | 0 | 55 | 10.000.000,00 | - | 10.000.000 |
| 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%) | Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%) | 100 | 12 | 12 | 24.661.518,00 | 24.660.723 | 24.661.518 |
| 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI (Orang) | Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI (Orang) | 5 | 0 | 5 | 24.661.518,00 | - | 24.661.518 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2,05 | 10 | Sosialisasi peraturan perundang-Undangabn | Sosialisasi peraturan perundang-Undangabn | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang) | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang) | 5 | 0 | 5 | 24.661.518,00 | - | 24.661.518 |
| 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Junmlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (oang) | Junmlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (oang) | 22 | 22 | 22 | 24.661.518,00 | 110.600.000 | 24.661.518 |
| **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)** | **Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)** | **100** | | | **159.610.100,00** | **374.889.100** | **159.610.100** |
| 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | 3 | 3 | 3 | 4.056.000,00 | 4.054.000 | 4.056.000 |
| 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit) | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit) | 3 | 4 | 3 | 24.305.100,00 | 49.250.000 | 24.305.100 |
| 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit) | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit) | 1 | 1 | | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 20 | 11 | 20 | 8.521.000,00 | 9.003.000 | 8.521.000 |
| 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan /atau penggandaan yang disediakan (jenis) | Jumlah barang cetakan dan /atau penggandaan yang disediakan (jenis) | 3 | 3 | 3 | 5.000.000,00 | 6.000.100 | 5.000.000 |
| 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar) | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar) | 72 | 72 | 72 | 7.740.000,00 | 7.680.000 | 7.740.000 |
| 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | 100 | 100 | 100 | 8.988.000,00 | 9.000.000 | 8.988.000 |
| 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | 451 | 179 | 451 | 100.000.000,00 | 288.902.000 | 100.000.000 |
| **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)** | **Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)** | **100** | | | **245.000.000,00** | **21.500.000** | **245.000.000** |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | 1 | 0 | 1 | 20.000.000,00 | - | 20.000.000 |
| 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | 2 | 0 | 2 | 200.000.000,00 | - | 200.000.000 |
| 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan (Unit) | Jumlah Mebel yang diadakan (Unit) | 5 | 4 | 5 | 5.000.000,00 | 6.500.000 | 5.000.000 |
| 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 4 | 1 | 4 | 20.000.000,00 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)** | **Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)** | **1** | **-** | **-** | **3.217.712.745,00** | **172.208.528** | **2.236.356.058** |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan (Surat) | Jumlah surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan (Surat) | 500 | 500 | 500 | 3.000.000,00 | 3.008.420 | 3.000.000 |
| 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon,listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | Jumlah rekening telepon,listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | 3 | 2 | 3 | 2.118.756.058,00 | 54.600.108 | 2.118.756.058 |
| 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayanrkan (orang) | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayanrkan (orang) | 9 | 9 | 9 | 114.600.000,00 | 114.600.000 | 114.600.000 |
| **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)** | **persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)** | **100** | **-** | **-** | **168.990.000,00** | **147.190.000** | **168.990.000** |
| 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (Unit) | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (Unit) | 13 | 13 | 13 | 51.000.000,00 | 51.200.000 | 51.000.000 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit) | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit) | 3 | 0 | 3 | 57.000.000,00 | - | 57.000.000 |
| 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | 57 | 57 | 57 | 50.990.000,00 | 50.990.000 | 50.990.000 |
| 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit) | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 2 | 10.000.000,00 | 45.000.000 | 10.000.000 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)** | **Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)** | **100** | **-** | **-** | **1.947.610.000,00** | **513.601.300** | **453.500.000** |
| | | | | **Persentase Rumah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)** | **Persentase Rumah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)** | **100** | | | | | |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| **2,01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang akan di bangun dan rehabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah susun dan rumah Khusu yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan jumlah unit dalam Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)** | **jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang akan di bangun dan rehabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah susun dan rumah Khusu yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan jumlah unit dalam Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)** | **2** | **2** | **2** | **20.000.000,00** | **58.761.300,00** | **20.000.000,00** |
| 2.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten (laporan) | Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten | 4 | 4 | 4 | 10.000.000,00 | 41.319.300 | 10.000.000 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI (laporan) | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2,01 | 06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumalah laporan hasil pendataan Rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan (laporan) | Jumalah laporan hasil pendataan Rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan (laporan) | 4 | 1 | 4 | 10.000.000,00 | 17.442.000 | 10.000.000 |
| **2.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Persentase rumah korban bencna atau relokasi program kabupaten/kota yang di rehabilitasi dan dibangun ('%)** | **Persentase rumah korban bencna atau relokasi program kabupaten/kota yang di rehabilitasi dan dibangun ('%)** | **100** | **-** | **-** | **250.000.000,00** | **250.000.000** | **250.000.000** |
| 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100 | 5 | 100% | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2,03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Persentase rumah korban bencana yang di bangun ('%) | Persentase rumah korban bencana yang di bangun ('%) | 100 | 5 | 100% | 100.000.000,00 | 100.000.000 | 100.000.000 |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.03 | 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase rumah khusus bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yangdibangun('%) | Persentase rumah khusus bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yangdibangun('%) | 100 | 5 | 100% | 100.000.000,00 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 2.05 | | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang di kelolah (lokasi)** | **Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang di kelolah (lokasi)** | **100** | | | **166.500.000,00** | **179.220.000** | **166.500.000** |
| 2.05 | 02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelolah (lokasi) | Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelolah (lokasi) | 8 | 7 | 8 | 166.500.000,00 | 179.220.000 | 166.500.000 |
| **2,06** | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan (rekomendasi)** | **Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan (rekomendasi)** | **3** | **3** | **3** | **55.080.000,00** | **25.620.000** | **17.000.000** |
| 2.06 | 03 | Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang di terbitkan (rekomendasi) | Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang di terbitkan (rekomendasi) | 3 | 3 | 3 | 17.000.000,00 | 25.620.000 | 17.000.000 |
| | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani ('%)** | **Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani ('%)** | **25** | **-** | **-** | **3.529.080.000,00** | **3.553.050.000** | **599.000.000** |
| | | | | **Rasio rumah layak huni ()** | **Rasio rumah layak huni ()** | **18** | | | | | |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| **2.01** | | **Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (dokumen)** | **Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (dokumen)** | **4** | **4** | **4** | **200.000.000,00** | **475.000.000** | **42.000.000** |
| 2.01 | 02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penyusunan dan/atau Review serta Legalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh yang disusun (dokumen) | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh yang disusun (dokumen) | 1 | 1 | 1 | 17.000.000,00 | 450.000.000 | 17.000.000 |
| 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (kegiatan) | Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (kegiatan) | 4 | 2 | 4 | 25.000.000,00 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 2.03 | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ('%)** | **Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ('%)** | **60** | **61%** | **61%** | **3.329.080.000,00** | **3.078.050.000** | **557.000.000** |
| | | | | **Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (ha)** | **Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh** | **21** | **21,2 ha** | **21,2 ha** | | | |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| | | | | | (ha) | | | | | | |
| 2.03 | 01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen Master Plan Peremajaan/Pemugaran Permukiman (dokumen) | Jumlah dokumen Master Plan Peremajaan/Pemugaran Permukiman (dokumen) | 3 | 2 | 3 | 300.000.000,00 | 210.000.000 | 10.000.000 |
| 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit) | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit) | 200 | 100 | 200 | 29.080.000,00 | 39.850.000 | 500.000.000 |
| 2.03 | 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenagan Kabupaten (kawasan) | Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenagan Kabupaten (kawasan) | 3 | 1 | 3 | 3.000.000.000,00 | 2.828.200.000 | 47.000.000 |
| | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase RTLH diluar kawasan perukiman kumuh yang di tangani ('%)** | **Persentase RTLH diluar kawasan perukiman kumuh yang di tangani ('%)** | **3** | **-** | **-** | **55.080.000,00** | **-** | **20.000.000** |
| 2,01 | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah seluruh RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani ('%)** | **Jumlah seluruh RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani ('%)** | **7** | **-** | **-** | **55.080.000,00** | **-** | **20.000.000** |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2,01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layyak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layyak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Perbaikan rumah tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kubuh diluar kawasan pemukiman kumuh (unit) | Jumlah Perbaikan rumah tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kubuh diluar kawasan pemukiman kumuh (unit) | 200 | 0 | 200 | 55.080.000,00 | - | 20.000.000 |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU ('%)** | **Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU ('%)** | **21** | **-** | **-** | **14.428.458.645,00** | **359.000.000** | **192.000.000** |
| 2,01 | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Jumlah seluruh lingkungan perumahan (lingkungan perumahan)** | **Jumlah seluruh lingkungan perumahan (lingkungan perumahan)** | **57** | **-** | **-** | **14.428.458.645,00** | **359.000.000** | **192.000.000** |
| 2,01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU (lingkungan) | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU (lingkungan) | 10 | 7 | 10 | 14.428.458.645,00 | 359.000.000 | 192.000.000 |
| | | **PROGRAM PENYELESAIAN SANGKETA TANAH GARAPAN** | **PROGRAM PENYELESAIAN SANGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase penyelesaian kasus tanah negara ('%)** | **Persentase penyelesaian kasus tanah negara ('%)** | **100** | **-** | **-** | **52.444.400,00** | **41.234.675** | **15.000.000** |
| 2,01 | | **Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kasus yang terdaftar (kasus)** | **Jumlah kasus yang terdaftar (kasus)** | **5** | **-** | **-** | **52.444.400,00** | **41.234.675** | **15.000.000** |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2,01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Mediasi Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus yang ditangani (kasus) | Jumlah kasus yang ditangani (kasus) | 5 | 5 | 5 | 52.444.400,00 | 41.234.675 | 15.000.000 |
| | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase luas lahan yang di bebasan ('%)** | **Persentase luas lahan yang di bebasan ('%)** | **100** | **100%** | **100%** | **11.893.795.000,00** | **5.647.068.675** | **5.250.000.000** |
| 2,01 | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)** | **Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)** | **330** | **330000** | **330000** | **11.893.795.000,00** | **5.647.068.675** | **5.250.000.000** |
| 2.01 | 01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2) | Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2) | 330 | 16500 | 330 | 11.893.795.000,00 | 5.647.068.675 | 5.250.000.000 |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Persentase pengamanan tanah Kosong aset pemda ('%)** | **Persentase pengamanan tanah Kosong aset pemda ('%)** | **100** | **100%** | **100%** | **164.545.135,00** | **69.123.900** | **50.000.000** |
| 2.02 | | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | **Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan investarisasi (bidang)** | **Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan investarisasi (bidang)** | **15** | **15** | **15** | **164.545.135,00** | **69.123.900** | **50.000.000** |

| KODE | | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET | | | Pagu (Rp.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN | RKPD | PENJABRAN APBD 2022 | RKPD PERUBAHAN |
| 2.02 | 01 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (papan pengumuman/ patok batas) (bidang) | Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (papan pengumuman/ patok batas) (bidang) | 15 | 15 | 15 | 164.545.135,00 | 69.123.900 | 50.000.000 |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **Persentase izin lokasi ('%)** | **Persentase izin lokasi ('%)** | **100** | **-** | **-** | **37.105.135,00** | **13.748.025** | **15.000.000** |
| 2.01 | | **Penerbitan Izin Pembuka Tanah** | **Penerbitan Izin Pembuka Tanah** | **Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar (izin)** | **Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar (izin)** | **3** | **-** | **-** | **37.105.135,00** | **13.748.025** | **15.000.000** |
| 2.01 | 02 | Pengendaliaan Pemanfaatan Tanah Negara | Pengendaliaan Pemanfaatan Tanah Negara | jumlah izin lokasi yang di tangan (izin) | jumlah izin lokasi yang di tangan (izin) | 3 | 3 | 3 | 37.105.135,00 | 13.748.025 | 15.000.000 |
| | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase luas lahan bersertifikat ('%)** | **Persentase luas lahan bersertifikat ('%)** | **40** | **39,85%** | **39,85%** | **498.732.250,00** | **473.573.875** | **498.732.250** |
| 2.01 | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentaseluas lahan bersertifikat yang difasilitasi ('%)** | **Persentaseluas lahan bersertifikat yang difasilitasi ('%)** | **100** | **100%** | **100%** | **498.732.250,00** | **473.573.875** | **498.732.250** |
| 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (m2) | Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (m2) | 5.300.000 | 5300000 | 5300000 | 498.732.250,00 | 473.573.875 | 498.732.250 |

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran Pokok pada Tahun 2022 untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 14.243.389.593.

## 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD).

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini akan lebih dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait,khususnya ASN pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan demi tercapainya sasaran yang diinginkan. Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Agustus 2022

**Plt. KEPALA DPKPP**

**ANDI WIJA HASAN, ST**
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19740323200312100 4



Scanned with CamScanner